

## ABSTRAK

Direktorat Jenderal Pajak merupakan salah satu instansi pemerintah pusat dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia yang berperan utama dalam merealisasikan kemandirian pembiayaan negara. Direktorat Jenderal Pajak juga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, jujur, bersih dan berwibawa sehingga dapat dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

Sejak awal dekade 2000, Direktorat Jenderal Pajak semakin gencar meningkatkan citra perpajakan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di DJP yang disebut modernisasi perpajakan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menerapkan “*good governance*” dan “pelayanan prima” kepada masyarakat, demikian juga dengan tuntutan pelayanan yang lebih baik dari *stakeholder* perpajakan.

Modernisasi ditandai dengan perbaikan remunerasi berupa kenaikan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN). Dengan adanya perbaikan remunerasi diharapkan pegawai akan semakin giat dan termotivasi untuk bekerja dan meningkatkan produktivitasnya. Peran pimpinan dalam suatu organisasi juga tidak kalah penting dalam menghidupkan gairah dan motivasi kerja bawahannya serta menggerakkan seluruh potensi organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

Modernisasi juga ditandai dengan peningkatan penegakan disiplin pegawai, dimana pegawai akan mendapatkan *punishment* (hukuman) berupa sanksi pemotongan tunjangan keuangan bila melanggar disiplin pegawai.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan, kenaikan tunjangan keuangan dan sanksi pemotongan tunjangan keuangan (TK) terhadap motivasi kerja pegawai. Instrumen yang digunakan berupa kuisioner dengan menggunakan skala Likert dengan nilai 1 – 5. Metode yang digunakan adalah analisis jalur (*path analysis*) dan menggunakan software *Analyze Moment of Structures* (AMOS).

Dari hasil penelitian diketahui bahwa ketiga faktor ini sangat mempengaruhi motivasi kerja pegawai, adapun nilai koefisien jalur masing-masing variabel yaitu Kepemimpinan 0,281, Kenaikan TK 0,185 dan Sanksi Pemotongan TK 0,303. Namun dari ketiga variabel bebas tersebut yang paling berpengaruh adalah terhadap motivasi kerja pegawai adalah sanksi pemotongan TK dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,303 atau 30,3%. Hal ini berhubungan dengan disiplin kerja pegawai dimana para pegawai tidak ingin tunjangan keuangannya dipotong hanya karena melanggar aturan disiplin.